

PERAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MEMBANGUN NEGARA YANG DEMOKRATISAkhmad Aiyon Saifullah¹, Fany Fadilah², Mahfudotun Nailatur Rohma³¹23187203006, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pedagogi dan Psikologi,
Universitas PGRI Wiranegara²23187203018, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pedagogi dan Psikologi,
Universitas PGRI Wiranegara³23187203028, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pedagogi dan Psikologi,
Universitas PGRI Wiranegara1akhmadaiyonsaifulloh@gmail.com, 2fanyfadilah073@gmail.com,3nailamahfudotun@gmail.com**Abstrak**

Kewarganegaraan adalah status hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada individu dalam sebuah negara. Dalam konteks negara demokratis, kewarganegaraan memiliki peran sentral untuk memastikan berjalannya sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Partisipasi aktif warga negara dalam pemilu, pengawasan pemerintah, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta menjaga toleransi dan keharmonisan sosial adalah beberapa aspek penting dari peran kewarganegaraan dalam membangun negara demokratis. Meskipun demikian, tantangan seperti apatisme politik, ketidakadilan sosial, dan polarisasi sosial masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mewujudkan negara yang demokratis dan inklusif.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Demokrasi, Partisipasi Politik, Hak Asasi Manusia, Toleransi, Pengawasan Pemerintah

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/SINDORO.v1i2.365

Copyright: Author**Publish by: SINDORO**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).**PENDAHULUAN**

Kewarganegaraan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bernegara yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban setiap individu tetapi juga berperan besar dalam kelangsungan sistem pemerintahan yang demokratis. Negara demokratis mengandalkan partisipasi aktif dari setiap warganya dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Dengan demikian, kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada hak-hak yang diperoleh, melainkan juga pada kewajiban moral untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, menjaga keharmonisan sosial, dan memajukan negara. Artikel ini akan mengkaji peran kewarganegaraan dalam membangun negara yang demokratis melalui berbagai perspektif dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, di mana berbagai sumber referensi mengenai kewarganegaraan dan demokrasi dikaji untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana kewarganegaraan berperan dalam negara demokratis. Analisis difokuskan pada hubungan antara partisipasi aktif warga negara, keadilan sosial dan ekonomi, hak asasi manusia, pengawasan terhadap pemerintah, dan toleransi dalam masyarakat yang beragam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

➤ **Kewarganegaraan dan Demokrasi: Pengertian dan Keterkaitannya**

Demokrasi memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan arah negara melalui pemilu dan partisipasi politik. Kewarganegaraan memungkinkan warga negara untuk menikmati hak-hak tersebut, serta memenuhi kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat, seperti mengikuti pemilu dan menaati hukum.

➤ **Peran Kewarganegaraan dalam Membangun Negara Demokratis**

a. Partisipasi Aktif dalam Pemilu dan Pemerintahan

Kewarganegaraan memberikan hak kepada warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, yang merupakan pilar utama dalam demokrasi. Partisipasi ini melibatkan tidak hanya memilih, tetapi juga mendukung kampanye, berdiskusi mengenai kebijakan, dan mengawasi implementasi keputusan politik.

b. Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekonomi

Negara demokratis harus memastikan pemerataan akses terhadap hak sosial dan ekonomi. Kewarganegaraan mendorong warga negara untuk berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang adil dan memperjuangkan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

c. Menjaga Kebebasan dan Hak Asasi Manusia

Kewarganegaraan mengharuskan warga negara untuk menghargai dan memperjuangkan kebebasan individu serta hak asasi manusia (HAM). Warga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebebasan ini dijaga, baik melalui jalur hukum maupun gerakan sosial.

d. Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah

Kewarganegaraan mengharuskan warga negara untuk aktif mengawasi kebijakan pemerintah, menuntut transparansi, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dalam pemerintahan.

e. Menghargai Perbedaan dan Memperkuat Toleransi

Kewarganegaraan berperan dalam menjaga keharmonisan sosial dengan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Dalam negara demokratis, penghormatan terhadap keberagaman adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai.

➤ **Tantangan Kewarganegaraan dalam Negara Demokratis**

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi politik di kalangan warga negara, terutama generasi muda dan mereka yang kurang berpendidikan. Selain itu, ketidakadilan sosial dan polarisasi sosial menjadi hambatan dalam menciptakan negara demokratis yang stabil. Pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi, inklusivitas, dan toleransi menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

➤ **Pembahasan**

Pada penulisan ini, digunakan **metode studi literatur**, yang bertujuan untuk menganalisis berbagai sumber yang relevan mengenai kewarganegaraan dan demokrasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran kewarganegaraan dalam negara demokratis, dengan fokus pada hubungan antara partisipasi aktif warga negara, keadilan sosial dan ekonomi, hak asasi manusia, pengawasan terhadap pemerintah, serta toleransi dalam masyarakat yang beragam.

Berdasarkan hasil analisis literatur, **kewarganegaraan dan demokrasi** memiliki hubungan yang erat, di mana kewarganegaraan tidak hanya memberikan hak bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik (seperti pemilu), tetapi juga memberikan kewajiban untuk menjaga kesejahteraan sosial dan berkontribusi terhadap kebijakan negara yang berkeadilan. Partisipasi aktif warga negara dalam berbagai bentuk, baik melalui pemilu maupun dalam kehidupan sosial, merupakan fondasi dalam memastikan keberhasilan dan kelangsungan sistem demokrasi.

KESIMPULAN

berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilu, pengawasan pemerintah, serta menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia. Kewarganegaraan juga berperan dalam memastikan terciptanya keadilan sosial, akuntabilitas pemerintahan, dan keharmonisan sosial melalui penghargaan terhadap perbedaan serta toleransi dalam masyarakat yang beragam.

Namun, masih terdapat tantangan besar dalam penerapan kewarganegaraan yang efektif, seperti rendahnya partisipasi politik, ketidakadilan sosial, dan polarisasi dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, inklusivitas, dan toleransi. Dengan demikian, kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab akan menjadi pilar utama dalam membangun negara demokratis yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

DAFTAR PUSAKA

- Gellner, Ernest. (1997). *Nations and Nationalism*. Blackwell Publishers.
- Habermas, Jürgen. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Held, David. (2006). *Models of Democracy*. Polity Press.
- Kymlicka, Will. (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. Oxford University Press.
- Mansbridge, Jane. (1999). Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 'Yes'. *Journal of Politics*, 61(3), 628-657.
- T.H. Marshall, (1964). *Citizenship and Social Class*. Cambridge University Press.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- UNDP (United Nations Development Programme). (2002). *Democratic Governance: A Conceptual Framework*. United Nations.
- Cohen, Joshua. (1989). *Democracy and Liberty*. *Philosophy and Public Affairs*, 18(1), 3-42.